



Inovasi, Invensi, dan Komersialisasi Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional

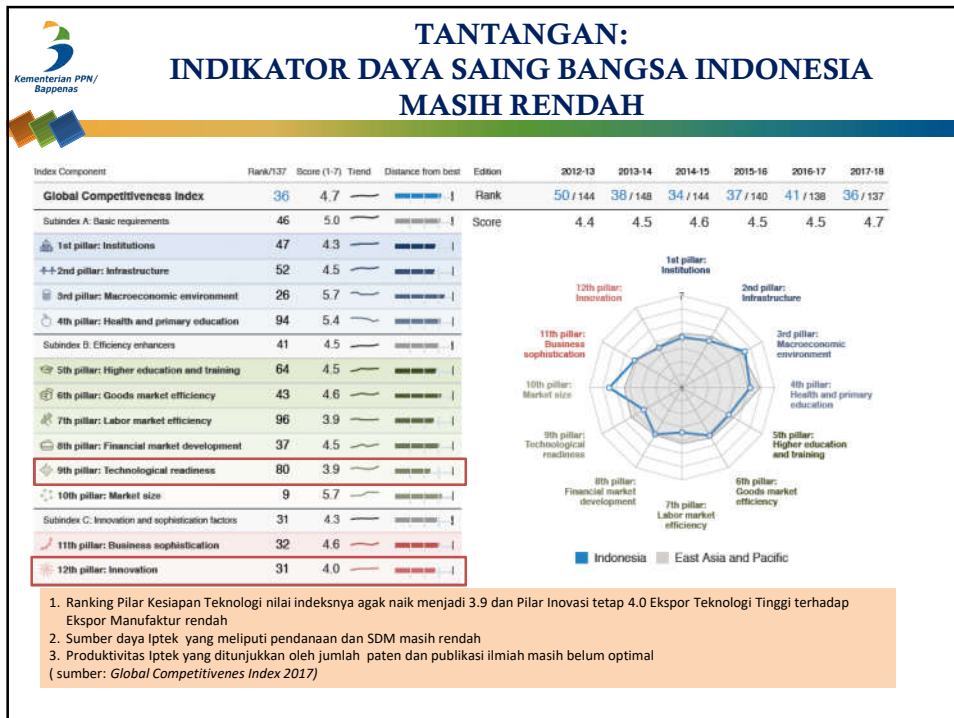
Bambang P.S. Brodjonegoro
Menteri PPN/Kepala Bappenas

Jakarta, 23 November 2017



TANTANGAN PEMBANGUNAN IPTEK DI MASA DEPAN

2





SIGNIFIKANSI IPTEK UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

5



SIGNIFIKANSI IPTEK UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

- Peradaban tinggi suatu bangsa ditandai oleh penguasaan Iptek
- Ekonomi berbasis pengetahuan dan ekonomi yang digerakkan inovasi sudah menjadi gejala umum, yang bertumpu pada kemajuan Iptek
- Pembangunan berbasis pengetahuan dan inovasi semakin menegaskan SDM berperan penting dan strategis dalam pembangunan

6



SISTEM INOVASI NASIONAL

7



SISTEM INOVASI NASIONAL


“Sistem inovasi dapat digambarkan sebagai suatu proses pengembangan teknologi dari lembaga penelitian atau entitas bisnis/industri, dimulai dari ide inovatif yang kemudian diterjemahkan menjadi kegiatan penelitian dan pengembangan, dilanjutkan dengan penerapan dan/atau perekayasaan. Sistem inovasi yang menjelma dalam aliran proses pengembangan teknologi harus mengandung unsur kebaruan, yang mendapat pengakuan dalam bentuk paten dan dilanjutkan dengan aplikasi teknis yang memberi manfaat ekonomi dan/atau sosial dari suatu produk baru yang dihasilkan melalui pengembangan teknologi tersebut.”

8



INTERVENSI KEBIJAKAN DALAM INOVASI





**Kementerian PPN/
Bappenas**

DUKUNGAN REGULASI UNTUK INOVASI

11



**Kementerian PPN/
Bappenas**

DUKUNGAN REGULASI UNTUK INOVASI



Negara	Persentase
Indonesia	0,1%
Malaysia	1,25%
China	2,0%
Singapura	2,20%
AS	2,75%
Jerman	3,90%
Swedia	3,20%
Jepang	3,60%
Korea Selatan	4,0%

Anggaran yang disediakan Pemerintah melalui APBN untuk membiayai penelitian dan pengembangan hanya sekitar 0,1 persen saja dari PDB, suatu angka yang sangat kecil dibandingkan belanja publik untuk riset dan pengembangan di negara-negara Asia lain.

Pengembangan IPTEK di Indonesia masih belum mendapat perhatian yang memadai, tercermin pada alokasi anggaran untuk *research and development* yang masih minimal.

ANGGARAN
Dari total anggaran riset yang ada, sekitar 80 persen berasal dari anggaran Pemerintah, hanya sekitar 20 persen saja berasal dari industri dan swasta. Hal ini berbeda dengan negara yang sudah maju, anggaran riset dari industri mencapai 75%.



BELANJA
Publik yang terbatas dan kontribusi sektor swasta yang minimal untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan menjadi alasan mengapa kualitas dan kuantitas hasil penelitian di Indonesia yang menghasilkan inovasi belum berkembang optimal.


- ❖ pemerintah perlu mengambil kebijakan terobosan dengan menawarkan *double tax deduction*, Untuk mendorong pihak swasta bersedia untuk berkontribusi lebih besar dalam kegiatan riset dan pengembangan
- ❖ Penyiapan kerangka regulasi yang dapat mendukung riset dan inovasi di Indonesia (RUU Sisas IPTEK dan Turunannya)

12



INOVASI TEKNOLOGI: INKLUSI DAN KOMERSIALISASI

13



LANGKAH KE DEPAN UNTUK PEMBANGUNAN IPTEK

- Pengembangan teknologi tepat guna merupakan wujud konsep inklusi dalam pembangunan
- Penambahan inkubator-inkubator bisnis yang menjadi tempat bagi para pelaku inovasi untuk mengeksplorasi ide-ide inovatif dan mengomersialisasikan invensi-invensi yang potensial
- Perguruan tinggi membantu Pemerintah untuk mempersiapkan para mahasiswa agar memiliki mental menjadi technopreneur
- Perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitas untuk dapat menarik kepercayaan pihak swasta
- Mendorong perubahan pola bisnis dari Industri kita dari usaha perdagangan atau perakitan menjadi usaha produsen yang inovatif
- Membentuk lembaga intermediasi yang mendukung inovasi

14



TERIMA KASIH